

Kebijakan Hak Asasi Manusia

Asia Pacific Rayon (APR) berkomitmen dalam pembangunan berkelanjutan dan menjunjung tinggi filosofi bisnis kami untuk melakukan apa yang "Baik untuk Negara, Baik untuk Masyarakat, Baik untuk Iklim, Baik untuk Pelanggan, dan Baik untuk Perusahaan".

Kami mengemban tanggung jawab perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia, termasuk hak-hak masyarakat adat dan komunitas, serta berkomitmen untuk:

Bertindak sesuai dengan konvensi dan standar hak asasi manusia yang diakui secara internasional berikut ini:

- UU Hak Asasi Manusia Internasional (International Bill of Human Rights)
- Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (UN Guiding Principles on Business and Human Rights)
- Deklarasi Organisasi Buruh Internasional tentang Prinsip-prinsip dan Hak-hak Mendasar di Tempat Kerja (International Labor Organization's (ILO) Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work) Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat
- Mematuhi hukum lokal dan nasional, termasuk semua perjanjian internasional terkait yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia. Jika ada konflik antara hukum nasional dan internasional dan kebijakan Perusahaan, kami akan mematuhi hukum nasional sembari berusaha untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia.
- Menghormati sepuluh prinsip United Nations Global Compact.
- Mengacu pada standar internasional dan inisiatif sukarela yang dapat membantu mengatasi setiap tantangan unik mengenai hak asasi manusia.

Kebijakan ini berlaku untuk seluruh karyawan, unit bisnis, dan badan hukum dalam APR dan Asia Pacific Yarn (APY). Kami juga akan mengikutsertakan pemasok kami dan pihak lainnya yang berada dalam rantai nilai kami, untuk mendukung mereka dalam memenuhi standar nasional dan internasional hak asasi manusia

Terkait karyawan, kami berkomitmen untuk:

- Mencegah dan menghapuskan segala bentuk kerja paksa, memastikan karyawan bebas meninggalkan pekerjaan atau mengakhiri pekerjaan mereka dengan pemberitahuan sesuai dengan hukum memaksa dan hukum kontrak.
- Memastikan bahwa seluruh karyawan memiliki kontrak kerja atau syarat dan ketentuan sebagaimana diwajibkan oleh hukum.
- Memberikan upah, jam kerja, dan tunjangan adil yang sesuai dengan standar hukum atau industri serta melibatkan para ahli yang relevan dan pemangku kepentingan lokal, seperti serikat pekerja.
- Toleransi nol untuk pekerja di bawah umur.
- Toleransi nol untuk setiap perlakuan tidak manusiawi terhadap karyawan, segala bentuk kerja paksa, perbudakan modern, perdagangan manusia, hukuman fisik atau jenis pelecehan lainnya.

- Mendorong persamaan kesempatan dan keberagaman di tempat kerja, termasuk kesempatan dan partisipasi yang sama bagi perempuan, serta berupaya untuk menghapus segala bentuk diskriminasi dan pelecehan
- Melindungi kesehatan dan keselamatan dari karyawan kita dan meningkatkan kesejahteraan mereka.
- Menyediakan lingkungan kerja yang aman.
- Menghormati hak semua karyawan untuk membentuk dan bergabung dalam serikat pekerja sesuai pilihan mereka tanpa takut adanya pembalasan atau diskriminasi.

Mengelola Dampak Hak Asasi Manusia Kami akan berusaha untuk mengelola dan mengurangi resiko hak asasi manusia dalam operasi dan rantai pasokan kami melalui kerangka Uji Tuntas Hak Asasi Manusia (Human Right Due Diligence, HRDD). Kami menyadari bahwa masyarakat dan hak mata pencaharian mereka, hak-hak kelompok rentan (seperti kelompok masyarakat adat), perempuan, pekerja imigran dan temporer ini merupakan aspek penting di tempat kami beroperasi.

Kami berkomitmen untuk:

- Mengembangkan dan menerapkan kerangka Human Rights Due Diligence (HRDD) untuk mengidentifikasi pemegang hak dan hak-hak mereka, serta potensi dan dampak sesungguhnya dari kegiatan kami terhadap hak asasi manusia.
- Mencegah atau mengurangi setiap dampak hak asasi manusia yang teridentifikasi atau berpotensi merugikan terkait dengan kegiatan operasional kami.
- Menyediakan atau bekerjasama untuk pemulihan (remediation) tepat waktu dan adil melalui proses yang sah dari setiap dampak yang dapat merugikan hak asasi manusia

Keterlibatan Pemangku Kepentingan Kami akan melibatkan pemangku kepentingan dan/atau perwakilan mereka untuk mengidentifikasi dan mencegah risiko pelanggaran hak asasi manusia.

Kami berkomitmen untuk:

- Terlibat dengan pemangku kepentingan terkait dan/atau dengan perwakilan yang sah melalui dialog yang transparan.
- Mengenali pentingnya keberagaman dan warisan budaya dalam komunitas kita, dan memahami perbedaan kebutuhan dari kelompok-kelompok di dalam komunitas.
- Terlibat dengan pemasok kami dalam pendekatan hak asasi manusia mereka dan dampak sosial yang lebih luas.
- Mempromosikan hubungan yang kuat dan mendukung mata pencaharian dengan masyarakat lokal.

Mekanisme Pengaduan dan Akses ke Pemulihan Kami memiliki mekanisme penanganan keluhan yang mudah diakses melalui saluran online dan offline untuk semua pemangku kepentingan untuk menyampaikan setiap potensi masalah, termasuk yang terkait dengan hak asasi manusia.

Karyawan dapat melaporkan masalah yang mereka hadapi melalui hotline Whistleblowing tertutup dengan jaminan anonimitas dan kerahasiaan. Semua keluhan dan masalah yang diangkat akan dicatat dan diinvestigasi untuk mendapatkan penyelesaian yang memuaskan.

Kami berkomitmen untuk:

- Memastikan bahwa tidak seorang pun akan dihukum karena menyampaikan kepada manajemen dugaan pelanggaran segala Kebijakan perusahaan, atau masalah hukum atau etika apa pun.
- Menyediakan dan bekerja sama dalam proses pemulihan yang efektif secara tepat waktu, adil dan sah, termasuk melalui dialog dan keterlibatan pemangku kepentingan.
- Memantau secara teratur keefektifan mekanisme penangan keluhan perusahaan.

Tata Kelola dan Pelaporan Menghargai hak asasi manusia merupakan bagian integral dari pendekatan manajemen dan komitmen keberlanjutan kami secara keseluruhan. Di Grup APRIL, Komite Eksekutif, yang terdiri dari Presiden dan pemimpin senior dari seluruh bisnis, memastikan penerapan tata kelola keberlanjutan yang kuat, termasuk hak asasi manusia. Hal ini juga diawasi oleh Komite Penasihat Pemangku Kepentingan independen yang berfungsi sebagai saluran bagi para pemangku kepentingan untuk menyampaikan keprihatinan dan keluhan mereka, di antara fungsi-fungsi lainnya.

Kami akan secara teratur meninjau dan melaporkan kemajuan yang dicapai dalam mengidentifikasi, mencegah, dan memulihkan setiap kasus pelanggaran. Hal ini akan disampaikan melalui Laporan Keberlanjutan tahunan perusahaan, serta melalui situs web kami.

Kebijakan ini akan dipantau secara berkala dan ditinjau secara periodik, selaras dengan peningkatan bisnis kami secara keseluruhan.